

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I (%)
Sasaran Program 1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing					
1.1	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	84,76*	84,76*	100%*
1.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	6,76*	6,76*	100%*
Sasaran Program 2. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas					
2.1	Tingkat Input Maturitas Sirkular	Persentase	9,4%*	9,4%*	100%*
2.2	Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan	Nilai	Laki-laki 17.138rb; Perempuan 10.086rb*	Laki-laki 17.138rb; Perempuan 10.086rb*	100%*
Sasaran Program 3. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif					
3.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan	Persentase	25%**	25%**	100%**
Sasaran Program 4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Sesuai dengan Standar Nasional					
4.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase	25%**	25%**	100%**
Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas					
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	Indeks	3 dari 4	3 dari 4*	100%*
Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik					
6.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat	Persentase	25%**	25%**	100%**

Keterangan :

* Masih bersifat proyeksi berdasarkan tren data dari tahun ke tahun serta *activity* yang dilaksanakan dan target bersifat tahunan sehingga tidak dapat dipecah ke triwulanan

** Target dan Realisasi berdasarkan proyeksi dan activity Triwulan I Tahun 2026

Kinerja Sekretariat Kementerian sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing
----------	--

Pencapaian Sasaran Program 1 : Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Reformasi Birokrasi General
2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Nilai Reformasi Birokrasi General

Latar Belakang

Kemenko Perekonomian mengukur tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi melalui 2 indikator, yaitu : Nilai RB General dan Nilai RB Tematik. Reformasi Birokrasi (RB) General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan isu-isu struktural (hulu) yang mencakup penguatan tata kelola organisasi, efektivitas atas proses bisnis, sistem kerja, dan peningkatan layanan publik. Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General ini berpedoman pada Permen PAN-RB No. 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Nilai RB General dihitung berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB terhadap capaian pelaksanaan pada indikator Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan. Setiap indikator memiliki bobot dan kriteria penilaian tertentu. Indikator RB General Kemenko Perekonomian terdiri dari 28 Indikator :

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General
2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General
3. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
4. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
5. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
6. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
7. Nilai SAKIP
8. Indeks Perencanaan Pembangunan
9. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
10. Tingkat Digitalisasi Arsip
11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
12. Indeks Pengelolaan Aset
13. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
14. Indeks Kualitas Kebijakan Publik
15. Indeks Reformasi Hukum (IRH)
16. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor
17. Indeks Tata Kelola Pengadaan
18. Indeks Sistem Merit
19. Indeks Pelayanan Publik
20. Indeks SPBE
21. Capaian Prioritas Nasional
22. Capaian Indikator Kinerja Utama
23. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
24. Tindak lanjut Rekomendasi
25. Indeks BerAKHLAK
26. Survei Penilaian Integritas
27. Survey Kepuasan Masyarakat.

Komponen yang dinilai pada RB General sebagai berikut :

No.	Komponen Penilaian	Bobot
A	Komponen Pengungkit	
	I. Pemenuhan	20,00
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00
	III. Reform	30,00
	Total Komponen Pengungkit	60,00
B	Komponen Hasil	
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00
4.	Kinerja Organisasi	10,00
	Total Komponen Hasil	40,00
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00

Tujuan dari IKU ini untuk dapat menggambarkan pelaksanaan atas RB General di lingkungan Kemenko Perekonomian dijalankan secara konsisten, terukur dan berkelanjutan sehingga menjadi alat ukur keberhasilan terhadap tata kelola organisasi

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian masih belum dapat ditentukan karena nilai ini dikeluarkan pada akhir tahun. Nilai triwulan I ini merupakan proyeksi nilai RB General yang diharapkan tercapai pada tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	84,76	84,76*	100%*

**Proyeksi nilai RB General tahun 2026*

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 yang disampaikan oleh Kementerian PANRB, pada hasil LHE RB General nilai Kemenko Perekonomian memperoleh 80,5 poin, dengan peningkatan pada indikator – indikator :

1. Rencana Aksi Pembangunan RB General (Naik 0,08 poin),
2. Nilai SAKIP (Naik 0,04),
3. Indeks Pengelolaan Aset (Naik 0,005),
4. Indeks reformasi hukum (Naik 0,02),
5. Indeks tata kelola pengadaan (Naik 0,15),
6. Capaian prioritas nasional (0,25),
7. Capaian IKU (Naik 0,07), dan
8. Survey Kepuasan Masyarakat (Naik 0,42).

Namun demikian, terdapat indikator yang masih rendah dan perlu perhatian lebih, seperti :

1. Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (0,5 dari 3)
2. Tindak lanjut Rekomendasi BPK (63,76%)
3. Indeks BerAKHLAK (82,67, masih dibawah target 85)
4. Survey Penilaian Integritas (81,81 dari target 82)
5. Indeks Tata Kelola Pengadaan (75,76 dari target 85)

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi General			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penyusunan matriks evaluasi dan strategi perbaikan	Terlaksana	Penyusunan matriks disusun berdasarkan hasil evaluasi RB sementara
2.	Pemetaan indikator – indikator RB General yang diprioritaskan naik di tahun 2026	Terlaksana	Pemetaan dilakukan pada indeks RB General yang memiliki bobot tertinggi, dan telah disusun hasil rekapitulasi catatan dan rekomendasi dari evaluator meso
3.	Koordinasi PIC dukungan administrasi Renaksi RB General di unit – unit kerja	Terlaksana	Dilakukannya pendampingan dalam tahap sanggah atas nilai RB <i>General</i>
4.	Penyusunan <i>draft</i> peraturan Renaksi RB General tahun 2026	Terlaksana	Penyusunan draft peraturan rencana aksi disusun dengan membuat lampiran rencana aksi yang pada triwulan I dalam tahap pembahasan
5.	Pemanfaatan <i>platform</i> pelaksanaan renaksi RB General 2026	Tertunda/ Digeser	Platform SIMERSI masih menunggu peraturan rencana aksi diterbitkan
6.	Melaksanakan internalisasi kepada para PIC pengampu setiap indikator RB General	Tertunda/ Digeser	Dilaksanakan pada triwulan II

Upaya - upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Kemenko Perekonomian telah melakukan internalisasi dan atau pendampingan kepada para PIC pengampu IKU RB General
2. Kemenko Perekonomian telah menyampaikan sanggah atas hasil evaluasi RB sementara yang telah diberikan oleh para evaluator meso melalui Sistem Portal RB Nasional

3. Kemenko Perekonomian telah melakukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian PANRB dalam hal *update* rencana kebijakan RB tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

1. Pelaksanaan rapat penyampaian sanggah yang dilaksanakan secara langsung dikantor Kemenko Perekonomian
2. Pelaksanaan rapat penyusunan tindak lanjut atas rekomendasi evaluator meso

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 134.435,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Hingga Triwulan I, instansi pembina yaitu Kementerian PANRB belum menerbitkan Peraturan Menteri PANRB yang mengatur tentang pelaksanaan RB tahun 2026 dan tahun berikutnya

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Pelaksanaan RB tetap mengacu pada peraturan Kementerian PANRB sebelumnya yaitu KepmenPANRB 182 Tahun 2024 dan SE MenpanRB Nomor 6 Tahun 2025

1.2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik

Latar Belakang

Reformasi Birokrasi Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tat kelola di sektor – sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan RB pada periode transisi tahun 2025. Tema RB Tematik pada periode 2025 – 2029 meliputi :

1. RB Pengentasan Kemiskinan
2. RB Peningkatan Investasi
3. RB Mendorong Hilirisasi
4. RB Mendorong peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan
5. RB Mendukung Ketahanan Pangan
6. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan

Tujuan dari indikator kinerja utama ini, untuk menggambarkan tingkat keterlibatan Kemenko Perekonomian dalam penyelesaian isu-isu strategis nasional yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU ini pada tahun 2026 bernilai 6,76 poin. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target peningkatan tahun sebelumnya. Hingga Triwulan I tahun 2026, nilai Reformasi Birokrasi Tematik belum dapat ditentukan karena penilaian

dilaksanakan pada akhir tahun oleh Kemenpan RB. Nilai triwulan I ini merupakan proyeksi nilai RB Tematik yang diharapkan tercapai pada tahun 2026.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 1.2 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	6,76	6,76*	100%*

*Proyeksi nilai RB Tematik tahun 2026

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Tematik			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penyusunan matriks evaluasi dan strategi perbaikan	Terlaksana	Telah disusunnya rekapitulasi hasil evaluasi RB Tematik sementara pada RB Tematik Pengentasan Kemiskinan dan Realisasi Investasi
2.	Pemetaan indikator – indikator Reformasi Birokrasi Tematik yang diprioritaskan naik di tahun 2026	Terlaksana	Disusun melalui pohon kinerja RB Tematik
3.	Koordinasi PIC dukungan administrasi rencana aksi RB Tematik di unit – unit kerja	Tertunda/ Digeser	Dilaksanakan di triwulan II
4.	Penyusunan <i>draft</i> peraturan Rencana Aksi RB Tematik tahun 2026	Tertunda/ Digeser	Dilaksanakan di triwulan II
5.	Pemanfaatan <i>platform</i> pelaksanaan rencana aksi RB Tematik 2026	Tertunda/ Digeser	Dilaksanakan di triwulan II
6.	Melaksanakan internalisasi kepada para	Tertunda/ Digeser	Dilaksanakan di triwulan II

	PIC pengampu setiap indikator RB Tematik		
--	--	--	--

Upaya - upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya :

- Kemenko Perekonomian telah melakukan rekapitulasi nilai atas Tema Pengentasan Kemiskinan dan Tematik Peningkatan Investasi.
- Kemenko Perekonomian telah melakukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian PANRB dalam hal *update* rencana kebijakan RB tahun 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Pelaksanaan rapat penyusunan tindak lanjut atas rekomendasi evaluator meso

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 134.435,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Hingga Triwulan I, instansi pembina yaitu Kementerian PANRB belum menerbitkan Peraturan Menteri PANRB yang mengatur tentang pelaksanaan RB tahun 2026 dan tahun berikutnya
- Belum terdapatnya penentuan tema kepada Kemenko Perekonomian tentang RB tematik yang diamantakn oleh KemenPANRB

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Pelaksanaan RB tetap mengacu pada peraturan Kementerian PANRB sebelumnya yaitu KepmenPANRB 182 Tahun 2024 dan SE MenpanRB Nomor 6 Tahun 2025

2

Sasaran Program 2 : Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2 : Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Input Material Sirkular
2. Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

2.1 Tingkat Input Material Sirkular

Latar Belakang

Berdasarkan Peta Jalan (*Road Map*) dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2045. Terdapat 5 (lima) sektor prioritas penerapan ekonomi sirkular yaitu sektor pangan, tekstil, konstruksi, elektronik, dan retail (berfokus pada kemasan plastik). Tingkat input material sirkular merupakan indikator yang digunakan untuk

mencapai sasaran dalam meningkatkan efisiensi, daya guna, dan daur ulang sumber daya dan material. Khususnya dalam hal penggunaan kembali material (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan pemanfaatan materi limbah kembali ke dalam rantai produksi. Penyusunan tingkat material sirkular (*circular material input rate*) berkaitan erat dengan kebutuhan global untuk beralih dari model ekonomi linear ke ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan RPJMN tahun 2025 - 2029, proyek prioritas yang menjadi kawalan Kementerian Perekonomian dalam menkoordinasikan kebijakan pada sektor Material Sirkular adalah :

1. Pengembangan kebijakan, teknologi dan fasilitasi pengelolaan sampah dengan prinsip sirkular
2. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Nikel
3. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Tembaga
4. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Bauksit
5. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Timah
6. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri Kimia

Tingkat input material sirkular disusun sebagai alat ukur untuk mengevaluasi dan mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan memanfaatkan kembali material yang sudah ada, mengurangi limbah, dan mengurangi dampak lingkungan dari ekstraksi bahan mentah. Sebagai arah dari kebijakan nasional menuju siklus ekonomi sirkular diharapkan dapat digunakan sebagai solusi terhadap krisis lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh ekonomi linear yang diharapkan dapat berdampak pada efisiensi ekonomi dan penghematan biaya jangka panjang dengan mengurangi ketergantungan pada penggunaan bahan mentah (*virgin material*), mendorong industri baru dan menciptakan lapangan kerja hijau dalam sektor pengelolaan limbah dan teknologi bersih ramah lingkungan.

Dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi sirkular berkelanjutan, perlu adanya pengukuran secara kuantitatif terhadap tingkatan input material sirkular agar dampaknya dapat dianalisis dan ditingkatkan sehingga dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Sehingga diharapkan implementasi material sirkular memberikan manfaat nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ekonomi sirkular merupakan model ekonomi yang menerapkan pendekatan sistemik untuk meminimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Terdapat 3 arah kebijakan dan indikator utama Ekonomi Sirkular di Indonesia, antara lain:

1. Pengurangan penggunaan sumber daya dengan indikator Tingkat Input Material Sirkular. Indikator ini mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam produksi barang atau jasa. 'Tingkat Input Material Sirkular' tidak hanya mencakup penggunaan bahan daur ulang tetapi juga bahan yang digunakan kembali - termasuk reuse, refurbish, remanufaktur, dan penggunaan bahan terbarukan dalam sebuah produk. Indikator ini serupa dengan 'tingkat penggunaan secondary raw material' dan 'konten daur ulang', namun memiliki cakupan yang lebih luas yang mempertimbangkan semua jenis penggunaan bahan sekunder. Dengan baseline target tahun 2023 sebesar 9%, target pada 2026 sebesar 9,4% dan pada 2029 sebesar 10%.
2. Perpanjangan daya guna produk dan material, dengan indikator Tingkat Daya Guna.

3. Peningkatan daur ulang dan pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi, dengan indikator Tingkat Daur Ulang.

Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular Indonesia telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang berfokus pada 5 sektor prioritas dan aspek pendukung ekosistem sebagai acuan para pemangku kepentingan dalam mendorong transisi dari ekonomi linear menjadi sirkular di Indonesia. Lima sektor utama prioritas penerapan ekonomi sirkular di Indonesia antara lain: Pangan, Retail (fokus pada kemasan plastik), elektronik, konstruksi, dan tekstil). Kelima sektor ini mempresentasikan hampir 1/3 dari PDB Indonesia dan mempekerjakan >43 juta orang pada 2019.

Persentase indikator dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumusnya :

$$\text{Tingkat Input Material Sirkular} = \frac{\text{Jumlah PRO-P yang menerapkan Prinsip Sirkular}}{\text{Total PRO-P yang dikoordinasikan}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga triwulan I tahun 2026 nilai dari tingkat input material sirkular sebesar 9,4 berdasarkan proyeksi yang akan dicapai pada tahun 2026. Adapun hasil penilaian kinerja dari IKU ini dapat di gambarkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 2.1 Tingkat Input Material Sirkular	persentase	9,4%*	9,4%*	100%*

**Nilai masih bersifat proyeksi*

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 2.1 Tingkat Input Material Sirkular			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Identifikasi isu strategis utama penghambat peningkatan input material sirkular nasional	Terlaksana	- Pembahasan bersama KemenPPN/Bappenas dan K/L atas cascading Program Prioritas Ekonomi Sirkular dalam RPJMN 2025-2029 - Telah Rapat

			dilaksanakan Koordinasi Technical Committee Meeting Proyek Green Economic Recovery (GER) pada 29 Januari 2026. - Rapat Circular Executive 2026 koordinasi Economy Dialogue yang diselenggarakan BRIN pada 12 Februari 2026
2.	Pemetaan kondisi baseline dan gap kebijakan <i>circular economy nasional</i>	Tertunda/ Digeser	Belum terselesaikannya pemetaan urgensi dan kelembagaan dalam penerapan ekonomi sirkular
3	Pemetaan kebutuhan penguatan kebijakan, data, dan instrument insentif/disinsentif	Terlaksana	- Menyusun perencanaan kerja dan rencana aksi serta analisis mendalam terhadap sektor dan isu yang dikawal oleh Kemenko Perekonomian. - Mendata kebijakan dan regulasi serta stakeholder yang terkait dengan Tingkat Input Material Sirkular. - Melaksanakan FGD Penerapan Ekonomi Sirkular di Daerah dengan mengundang narasumber dari Pemkab Banyumas dan Pemprov Jawa Tengah.

Upaya - upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya :

- FGD Penerapan Ekonomi Sirkular di Daerah yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada 23 Januari 2026.
- Rapat koordinasi kick-off proyek pengembangan daur ulang baterai kendaraan listrik dan manajemen elektronik sirkular pada 27 Februari 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Pelaksanaan kegiatan *Coaching*

- Melaksanakan koordinasi dan rapat beberapa tema rapat dalam 1 kesempatan yang sama
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau workshop
- Pengumpulan dan sharing data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 71.964.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Belum terselesaikannya pemetaan urgensi dan kelembagaan dalam penerapan ekonomi sirkular

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam pembahasan identifikasi isu/permasalahan terkait dengan Tingkat Input Material Sirkular
- Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja dalam mengidentifikasi program kerja yang nantinya akan berkaitan dengan Tingkat Input material Sirkular.

2.2 Pengeluaran Perkapita Laki-Laki dan Perempuan

Latar Belakang

Berdasarkan RPJMN th. 2025-2029, Kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan merupakan Program Prioritas Nasional yang ke-4. Kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dan penguatan peran perempuan merupakan salah satu indikator pada PN ke-4 yang disasar melalui peningkatan kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang. Salah satu diantaranya diukur melalui indikator pengeluaran perkapita laki – laki dan perempuan. Indikator ini mengukur kesenjangan rata-rata pengeluaran per kapita antara penduduk laki – laki dan perempuan sebagai salah satu parameter disparitas kesejahteraan ekonomi berdasarkan gender. Adapun isu/permasalahan yang menjadi atensi awal dari IKU ini adalah terkait:

1. Partisipasi ketenagakerjaan masih rendah
2. Perekonomian masih didominasi laki-laki
3. Kesenjangan upah
4. Kewirausahaan perempuan masih rendah
5. Literasi digital perempuan lebih rendah
6. Inklusi dan literasi keuangan $p > I$

Selanjutnya, isu/permasalahan tersebut diolah menjadi dokumen keluaran yang meliputi:

1. Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
2. Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan;
3. Kertas Kerja Kebijakan;

4. Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu:

1. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi terkait pengeluaran perkapita laki-laki dan Perempuan
2. Rekomendasi kebijakan terkait peran dan efektifitas perempuan untuk memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, kegiatan utama yang difokuskan pada pengumpulan data yang terpilah menurut jenis kelamin, baik melalui survei, data statistik sosial ekonomi, maupun sumber administratif lainnya. Pengumpulan data ini mencakup partisipasi laki-laki dan perempuan pada instrument kegiatan ekonomi seperti TPAK, literasi digital, inklusi dan literasi keuangan, dan instrumen lainnya.

Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan hingga Triwulan I 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 2.2 Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan	Ribu Rupiah	Lk :17.138rb; Pr : 10.086*	Lk :17.138rb; Pr : 10.086*	100%*

**Nilai masih bersifat proyeksi*

Hingga Triwulan I Tahun 2026, dalam pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan, disampaikan sebagai berikut:

- Sekretariat mengawal indikator RPJMN 2025-2029 yang diampu oleh Kemenko Bidang Perekonomian, salah satunya yaitu terkait Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan
- Menyusun perencanaan kerja dan rencana aksi serta analisis mendalam terhadap sektor dan isu yang dikawal oleh Kemenko Perekonomian.
- Sinkronisasi kebijakan terkait peningkatan partisipasi ekonomi perempuan melalui identifikasi hambatan struktural ketenagakerjaan, peningkatan akses terhadap kesempatan kerja, penguatan keterampilan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektor yang mendukung pencapaian indikator Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) dengan LPEM UI.

Proyeksi triwulan I tahun 2026 tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2025. Kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Pengeluaran Perkapita Laki-laki dan Perempuan telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sehingga diprediksi penyelesaian SKP Pengeluaran Perkapita Laki laki dan Perempuan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I 2026 sebagai berikut:

IKU 2.2 Pengeluaran Perkapita Laki – Laki dan Perempuan			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Identifikasi kesenjangan pengeluaran per kapita antara laki-laki dan Perempuan	Terlaksana	Telah dilaksanakan identifikasi isu dan permasalahan terkait Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan melalui partisipasi dalam Validation Meeting kajian "Dari Potensi ke Partisipasi: Apa yang Membuat Perempuan Berpotensi Tinggi Memilih untuk Tidak Bekerja?" pada 28 Januari 2026.
2.	Koordinasi identifikasi program <i>crosscutting</i> antar Kementerian terkait pengeluaran perkapita Laki-laki dan Perempuan	Terlaksana	Telah dilaksanakan sinkronisasi kebijakan melalui pembahasan dan pemetaan kebijakan terkait peningkatan partisipasi ekonomi perempuan serta pengisian Evaluasi PUG mandiri sebagai penguatan basis data dan kebijakan responsif gender dalam mendukung pencapaian indikator PPLP.

Meskipun tren PPLP ditargetkan terus meningkat, pencapaian target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja, dominasi laki-laki pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas dan pendapatan lebih tinggi, serta masih adanya kesenjangan upah menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat

pengeluaran per kapita. Di samping itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan kewirausahaan masih relatif terbatas dan belum sepenuhnya didukung oleh akses yang setara terhadap teknologi digital maupun layanan keuangan. Kondisi tersebut tercermin dari tingkat literasi dan inklusi keuangan perempuan yang masih berada di bawah laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan melalui pengarusutamaan gender agar

peningkatan kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

Upaya - upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya :

- Pengisian Evaluasi PUG mandiri melalui aplikasi evaluasi PUG sebagai instrumen pemetaan kondisi demografi sekaligus penguatan basis data kesetaraan gender di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa, 24 Februari 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Pelaksanaan kegiatan *Coaching*
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Pengumpulan dan sharing data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai
- Pemanfaatan data dan hasil kajian yang telah tersedia sebagai bahan identifikasi isu dan permasalahan terkait Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan.
- Pelaksanaan koordinasi dan pembahasan secara terintegrasi dengan agenda kegiatan yang telah ada sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 89.996.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Capaian indikator Pengeluaran Per Kapita Laki-laki dan Perempuan (PPLP) dipengaruhi oleh berbagai faktor lintas sektor sehingga memerlukan koordinasi dan sinergi dengan banyak kementerian/lembaga terkait.
- Masih terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi partisipasi ekonomi perempuan, antara lain beban pengasuhan, keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja, serta kesenjangan keterampilan yang dapat berdampak pada capaian indikator PPLP.
- Ketersediaan data dan informasi pendukung yang diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator masih perlu diperkuat melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi laki-laki dan perempuan.
- Melakukan identifikasi dan pendalaman isu strategis yang memengaruhi partisipasi ekonomi perempuan melalui forum koordinasi, rapat, dan pemanfaatan hasil kajian dari berbagai pemangku kepentingan.

- Memperkuat pengumpulan dan pemanfaatan data serta informasi pendukung sebagai dasar perumusan kebijakan dan rekomendasi yang mendukung pencapaian indikator PPLP.
- Mendorong penguatan perspektif gender dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan.

3

Sasaran Program 3 : Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efisien

Pencapaian Sasaran Program 3 : Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efisien ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan

3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan

Latar Belakang

Indikator ini mengukur efektivitas koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang dilaksanakan melalui forum koordinasi, fasilitasi, dan sinergisitas antar Kementerian/Lembaga. Indikator Utama ini menekankan *outcome*, tingkat penerimaan dan pemanfaatan konkret dari hasil koordinasi yang telah dilaksanakan.

Adapun rekomendasi kebijakan lintas sektoral yang diampu oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2026 adalah :

1. Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
Kegiatan ini mencerminkan peran dari Kemenko Ekon dalam memastikan kebijakan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, terintegritas, dan berdampak. Melalui koordinasi ini diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak terjadi duplikasi kebijakan, stagnasi pelaksanaan, atau konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga
2. Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi
Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mencerminkan keadilan dan distribusi yang merata antar daerah, antar wilayah, serta kelompok masyarakat.

Rumus Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti:

$$\% \text{ R. Kebijakan Lintas Sektor} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Terealisasi}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti telah terealisasi sebesar 25%. Nilai ini merupakan penilaian mandiri berdasarkan pengukuran aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu pada proses penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektoral hingga Triwulan I 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 3.1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan	Persen	25%	25%*	100%*

**Hasil Realisasi dan %Kinerja berdasarkan pengukuran activity,*

Kebijakan lintas sektor yang aktivitasnya telah dilaksanakan hingga Triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Syariah

Ekonomi dan keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, baik di tingkat global maupun nasional. Indonesia turut mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah. Berbagai pencapaian di level internasional menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri ini. Pada tahun 2023 dan 2024, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index, yang menunjukkan kekuatannya sebagai destinasi utama wisata halal global. Selain itu, Indonesia juga menduduki posisi ketiga dalam sejumlah indikator ekonomi syariah global.

Selain keuangan syariah, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di Industri halal, yang mencakup makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan pariwisata, menjadi pilar penting ekonomi syariah dengan nilai pasar global USD 2,4 triliun pada 2024. Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 42 Tahun 2024 telah memperkuat sertifikasi halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tetapi keterbatasan auditor halal, biaya sertifikasi bagi UMKM, dan kurangnya standar halal internasional menghambat daya saing.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, dalam pencapaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan Ekonomi Syariah, disampaikan sebagai berikut:

- Melakukan pembahasan rancangan Program Kerja Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam.
- Mengawal Pembahasan Isu Halal dan Isu Strategis Lainnya pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).
- Monitoring implementasi serta kerja sama sektor prioritas, khususnya terkait sertifikasi halal dan fasilitasi perdagangan dalam kerangka Pasar Tunggal Uni Eropa (EU Single Market).

2. Indonesia National Single Window (INSW)

INSW merupakan sistem eletronik nasional yang mengintegrasikan proses perizinan ekspor, impor, dan logistik antar instansi pemerintah dalam satu platform digital. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window, tujuan utama INSW adalah meningkatkan sinergi dan kolaborasi kementerian/lembaga dalam membrikan efisiensi layanan publik yang terintegrasi serta terdigitalisasi di bidang ekspor, impor, dan logistik. INSW terus berupaya untuk meningkatkan daya saing nasional, kinerja

logistik nasional, iklim ekosistem investasi, serta memberikan kemudahan berusaha.

Isu strategis yang akan diselesaikan pada tahun 2026 antara lain: penyesuaian regulasi PP Nomor 28 Tahun 2025, integrasi layanan e-SKA, perluasan implementasi komoditas SIMBARA, migrasi sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM), serta mekanisme pengawasan Strategic Trade Management (STM). PP Nomor 28 Tahun 2025 telah mengamanatkan agar perizinan ekspor, impor, serta pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor (Iartas) dan neraca komoditas (NK) diajukan melalui sistem INSW. Indonesia juga akan menerapkan Strategic Trade Management (STM) dalam rangka pengawasan ekspor. Hal ini dikarenakan STM menjadi salah satu persyaratan dalam negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat.

Hingga triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan pembahasan terkait Indonesia Single Risk Management (ISRM) dalam rangka Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) Tahun 2025-2026 Khususnya pada agenda Penguatan Tata Kelola Impor yang melibatkan Tim STRANAS PK dan Lembaga National Single Window (LNSW) dengan tujuan memperkuat manajemen resiko yang terintegritas dan meminimalkan korupsi dalam tata kelola impor. Telah disepakati migrasi system engine manajemen resiko dari Ditjen Bea Cukai ke LNSW secara penuh Tujuannya agar formula scoring dan parameter resiko dapat digunakan secara terpusat oleh seluruh K/L.

3. Patriot

Sebagai bagian dari pelaksanaan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada Prioritas Nasional (PN) I. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dan menindaklanjuti Matriks Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2025-2029 pada tahun 2025, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus melaksanakan pendampingan, koordinasi, dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan integrasi pembinaan ideologi Pancasila dengan agenda pembangunan nasional berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata.

Kemenko Perekonomian, melalui Biro MKKS turut mendukung penguatan koordinasi dan penyamaan persepsi lintas K/L terkait tujuan, sasaran, dan indikator pembinaan ideologi Pancasila agar pelaksanaannya berjalan selaras dan terukur. Hingga triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan pembahasan Ekspose Capaian Kegiatan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam kegiatan ini, membahas penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Selain itu, ke depan akan dilakukan inventarisasi praktik baik, penyelarasan indikator pelaksanaan, serta penguatan integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam program dan kebijakan pembangunan nasional guna memastikan implementasi berjalan konsisten.

4. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Strategis (Satgas P2SP)

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Pemerintah yang berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga melalui Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Strategis (Satgas P2SP). Pembentukan Satgas

P2SP didasarkan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2025 tentang Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Unit Pendukung dalam Rangka Percepatan Program Strategis Pemerintah.

Seiring dengan dinamika pelaksanaan Program Strategis Pemerintah dan kebutuhan penguatan kelembagaan dalam mendukung agenda percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, kelembagaan Satgas P2SP kemudian mengalami transformasi menjadi Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3MPPE) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan susunan tugas dijabarkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua I Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi No. 313 Tahun 2026 tentang Sekretariat, Kelompok Kerja dan Unit Pendukung Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam struktur organisasi Satgas, Sekretariat berperan sebagai unsur pendukung yang melaksanakan fungsi administrasi, koordinasi, pengendalian, penyusunan laporan, pengelolaan data dan informasi, serta fasilitasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dan Unit Pendukung. Salah satu fungsi strategis yang dijalankan adalah Kanal Debottlenecking, yaitu mekanisme identifikasi, inventarisasi, koordinasi, dan fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan pelaksanaan Program Strategis Pemerintah agar target pelaksanaan dapat tercapai secara tepat waktu, efektif, dan akuntabel.

Hingga tanggal akhir Maret 2026, Kanal Debottlenecking telah menerima 49 aduan yang berasal dari berbagai badan usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kanal Debottlenecking telah berfungsi secara efektif sebagai mekanisme fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan Program Strategis Pemerintah.

Pelaksanaan fungsi Kanal Debottlenecking tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hambatan administrasi dan koordinasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap keberlangsungan investasi dan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Kanal Debottlenecking pada Satgas P3MPPE, diperlukan sejumlah langkah penguatan yang berorientasi pada transformasi digital, peningkatan tata kelola, dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Proyeksi triwulan I tahun 2026 tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan realisasi triwulan I tahun 2025. Hal ini dikarenakan indikator penyelesaian rekomendasi lintas sektor dapat dilaksanakan dengan baik pada triwulan I. Identifikasi isu dan permasalahan, serta sinkronisasi dan koordinasi kebijakan lintas sektor telah dilaksanakan dan diprediksi penyelesaian rekomendasi kebijakan lintas sektor dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 2.1 Tingkat Input Material Sirkular			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Identifikasi pemetaan isu strategis dan permasalahan lintas sektor	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Internal Pemetaan Indikator, Isu, dan Usulan Program Kerja Tahun 2026 terkait dengan Ekonomi Syariah. • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Program Kerja Komite Pengembangan UMKM Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) pada 21 Januari 2026. • Rapat Pembahasan Isu Halal dan Isu Strategis Lainnya pada Perjanjian Perdagangan Resiprokal (ART) Indonesia – Amerika Serikat pada 13 Maret 2026. • Rapat Finalisasi Usulan Program Kerja Bidang VIII Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia pada 22 Januari 2026. • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan ISRM dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) KPK pada 04 Februari 2026 • Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Pengisian

			Form Quick Win Program Moderasi Beragama pada 12 Maret 2026.
2.	Penyediaan data dan informasi untuk mendukung analisis kebijakan lintas sektoral	Terlaksana	Sudah terdapat data dan informasi untuk mendukung analisis kebijakan lintas sektoral
3.	Penyusunan kerangka analisis dan draft awal rekomendasi kebijakan lintas sektor yang relevan dengan masalah	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Pembahasan Ekspose Capaian Kegiatan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Kementerian/ Lembaga Tahun 2025 pada 20 Januari 2026 • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Indonesia Single Risk Management dengan LNSW dan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) KPK pada 25 Februari 2026.

Upaya - upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya :

- Menyusun bahan Ekonomi Syariah Indonesia dalam acara Seminar Internasional BPOM : *“Advancing Vaccines and ATMPs Regulatory Development and R&D Ecosystem Pathways from Upstream to Downstream”* pada 28 Januari 2026
- Menghadiri FGD Rancangan Hukum dan Regulasi *Strategic Trade Management* (STM) di Indonesia pada 5 Februari 2026
- Menghadiri Sosialisasi Standar Tata Kelola Pengembangan Layanan SINSW pada 10 Februari

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Pelaksanaan kegiatan *Coaching*
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting.
- Pengumpulan dan sharing data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai.
- Dilakukan kolaborasi pembiayaan dengan stakeholder terkait.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 50.545.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Masih perlunya penyelarasan program kerja diantara Komite Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam IAEI
- LNSW terkendala dalam penerapan kebijakan ISRM dikarenakan secara eksplisit tidak memiliki mandat sebagai dasar hukum terkait kewenangan pengelolaan manajemen Risiko terintegrasi serta pemanfaatan risk scoring lintas Kementerian/Lembaga
- Kanal Debottlenecking belum tersedia informasi yang bersifat real time, sehingga proses monitoring, validasi, dan pengambilan keputusan terkadang masih bergantung pada penyampaian data secara manual atau melalui koordinasi langsung dengan unit terkait.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Memperkuat kolaborasi dengan unit kerja di tiap kementerian/lembaga terkait.
- Optimalisasi peran Sekretariat sebagai koordinator pengendalian tindak lanjut hasil debottlenecking.

4

Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan Standar Nasional

Pencapaian Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan Standar Nasional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Latar Belakang

Persentase penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola pemerintah merupakan ukuran yang menggambarkan capaian atas penyelesaian dokumen penyelenggaraan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penyelesaian Dokumen Tata kelola merupakan hasil dari proses bisnis sekretariat yang berfokus pada empat bidang utama yakni perencanaan, hukum dan organisasi, umum dan sumber daya manusia dan komunikasi, layanan informasi dan persidangan. Seluruh Dokumen Tata Kelola yang dihasilkan harus mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh instansi pembina. Adapun kriteria yang menunjukkan bahwa dokumen yang dihasilkan telah sesuai dengan standar apabila (1) Format dan Subtansi telah sesuai dengan acuan yang digunakan, (2) Dokumen dihasilkan tepat waktu, (3) Dokumen yang mendapatkan sedikit perbaikan dari instansi pembina.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, nilai Reformasi Birokrasi yang telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 100% dari target triwulan I 2026 sebesar 25% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah	Persen	25%*	25%*	100%*

**Hasil Realisasi dan %Kinerja TW I berdasarkan pengukuran activity*

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 4.1 Persentase Penyelesaian Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Tersedianya Perjanjian Kinerja, Manual IKU, dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan	Terlaksana	Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2026 telah dilaksanakan oleh Sekretariat pada level Eselon I dan II yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Seluruh dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat yang telah ditetapkan di upload ke dalam Aplikasi Kinerja pada sisi Perencanaan. https://kinerja.ekon.go.id
2.	Tersedianya laporan kinerja triwulan I	Tertunda/ Digeser	Hingga bulan April 2026, Sekretariat Kementerian Perekonomian masih menyusun draft Laporan Kinerja triwulan I berdasarkan konsep

			laporan kinerja triwulanan yang telah dikonsepskan. Laporan kinerja triwulan I Sekretariat yang telah disusun kemudian ditetapkan oleh Pimpinan yang dilanjutkan dengan proses upload ke dalam Aplikasi Kinerja Ekon GO beserta dengan Data Dukung Kinerja di triwulan I (https://kinerja.ekon.go.id)
3.	Tersedianya dokumen notula, kajian <i>policy paper</i> , <i>policy brief</i> , dan dokumen standar keluaran kebijakan	Terlaksana	Telah dilakukan penyempurnaan atas dokumen Standar Keluaran Kebijakan
4	Tersedianya dokumen arah layanan pengelolaan system informasi dan penyediaan data	Terlaksana	Telah dilakukan layanan pengelolaan system informasi dan penyediaan data
5	Terselesaikannya dokumen perumusan produk hukum	Terlaksana	Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang statusnya sudah selesai dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun masih dalam proses pembahasan. Peraturan perundang-undangan yang sudah selesai dikoordinasikan beberapa di antaranya telah diundangkan sedangkan beberapa lainnya masih dalam proses pengesahan. Sementara itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang masih dalam proses pembahasan, sedang dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, maupun pemantapan; dan Untuk melaksanakan Amanat

			Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, setiap pembentukan Rancangan PUU diselenggarakan kegiatan konsultasi publik untuk menyaring partisipasi publik yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Rancangan PUU.
6	Tersusunnya rencana aksi RB Tematik dan General	Terlaksana dan digeser	Penyusunan draft peraturan rencana aksi general disusun dengan membuat lampiran rencana aksi yang pada triwulan I dalam tahap pembahasan. Rencana aksi tematik tertunda pada triwulan II.
7	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terlaksana	Telah dilakukan identifikasi dan pengembangan SOP di lingkungan Sekretariat Deputi yaitu SOP Koordinasi Data/Informasi Tata Kelola di Lingkungan Deputi
8	Tersusunnya standar pelayanan (SP)	Terlaksana	Pelaksanaan layanan keprotokolan dan ketatausahaan yang sesuai dengan standar pelayanan
9	Tersusunnya kelompok kerja (Pokja)	Terlaksana	Pembentukan kelompok kerja, sesuai dengan jumlah unit kerja JPT Pratama di lingkungan Kemenko Perekonomian
10	Penyusunan dokumen notula rapat Menko Perekonomian	Terlaksana	Sudah ada dokumen notula rapat Menko Perekonomian. seluruh naskah telah disampaikan tepat waktu, minimal 1 jam sebelum kegiatan berlangsung, tanpa keterlambatan.
11	Penyusunan dokumen tata Kelola SDM,	Terlaksana	Tersusunnya dokumen tata Kelola SDM, pengadaan

	pengadaan dan keuangan triwulan I		dan keuangan triwulan I
--	-----------------------------------	--	-------------------------

Upaya - upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya :

- Penetapan pegawai sebagai Person In Charge (PIC) dalam mengawal dan menetapkan roadmap RB;
- Melaksanakan digital working system dan evaluasi pelaksanaan Work From Anywhere;
- Menandatangani piagam Manajemen Risiko, dan menyusun Kertas Kerja Formulir Profil Risiko, dan Mitigasi Risiko;
- Melaksanakan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan kinerja;
- Menindaklanjuti hasil rekomendasi dan catatan Laporan Hasil Evaluasi pada tingkat Kementerian dan Eselon I ;
- Penguatan digital filling system dan integrasi dokumen berbasis cloud;
- Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan rekonsiliasi rutin dengan auditor 8. Pelaksanaan Coaching Clinic, Bimtek, Workshop, dan Capacity Building pegawai dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan dan Triwulanan, SPIP, Penyusunan IKU, Renaksi Reformasi Birokrasi, Manajemen Risiko, Audit BPK, dsb-nya

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Pelaksanaan kegiatan *Coaching*
- Optimalisasi Aplikasi SIMERSI
- Pengumpulan dan sharing data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive, One Drive, dst)
- Memaksimalkan penggunaan fasilitas Zoom Meeting kantor;

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 63.665.000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, capaian rencana aksi Tersusunnya rencana aksi RB Tematik dan General belum dapat direalisasikan secara optimal karena rencana aksi RB Tematik masih dalam proses penyusunan dan pengesahan melalui Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Persesmenko). Kondisi tersebut menyebabkan rencana aksi belum dapat diimplementasikan dan pemenuhan bukti dukung belum dapat dilakukan pada periode pelaporan Triwulan I Tahun 2026.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Menyiapkan bukti dukung pelaksanaan RB triwulan I dan menyampaikan bukti dukung dimaksud apabila Persesmenko Rencana Aksi telah ditetapkan
- Mengoptimalkan peran PIC Kinerja di masing-masing Biro sebagai lini pertama terkait ketaatan dokumen pelaporan

5 Sasaran Program 5 : Terselenggaranya Layanan Prima yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5 : Terselenggaranya Layanan Prima yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat

5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat

Latar Belakang

Layanan Sekretariat adalah layanan yang diberikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian kepada Kedeputian untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. **Sekretariat Kemenko Perekonomian juga menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam :**

1. Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perekonomian
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi ketatausahaan, SDM, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, humas, arsip
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
5. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
6. Pengelolaan data dan informasi
7. Pelaksanaan fungsi lainnya

Indikator kepuasan layanan Sekretariat mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat kepada Kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Kemenko Perekonomian. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);

Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan

2. Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);

Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan

3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);

Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan

4. Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);

Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman

5. Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)

Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum ada, dengan ringkasan tabel triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kemenko Perekonomian	Indeks	3 dari 4	3 (Baik)*	100%

Laporan Survei Kepuasan Layanan Sekretariat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada Semester I dan II. Pada semester I dilaksanakan pada bulan Juni 2026 dan Semester II dibulan Desember 2026. Kemudian pada akhir tahun, kedua nilai tersebut di rerata untuk mendapatkan nilai akhir indeks kepuasan Layanan Sekretariat Kementerian Perekonomian. Pada tahun 2025, indeks final kepuasan Layanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Adalah 3,56 dengan predikat Sangat Baik, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Ketanggapan pelayanan (*Responsiveness*), indeks 3,54 – Sangat Baik
- (2) Keandalan pelayanan (*Reability*), indeks 3,55 – Sangat Baik
- (3) Sarana dan prasarana fisik (*Tangible*), indenks 3,53 – Sangat Baik
- (4) Kepastian pelayanan (*Assurance*), indeks 3,57 – Sangat Baik
- (5) Sikap dalam pelayanan (*Emphaty*), indeks 3,60 – Sangat Baik

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Evaluasi hasil survey dan penyusunan rencana aksi peningkatan layanan	Terlaksana	Kegiatan ini dilaksanakan untuk menilai tingkat kualitas layanan, efektivitas pelaksanaan, serta tingkat kepuasan pengguna layanan selama tahun 2025. Evaluasi ini dilakukan melalui identifikasi masukan, kendala, dan kebutuhan pengguna sebagai bahan analisis dalam menyusun langkah perbaikan dan pengembangan layanan pada tahun 2026
2.	Penyelenggaraan sosialisasi atau workshop penguatan kapasitas SDM	Terlaksana	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan kesadaran pegawai dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan
3.	Pemanfaatan dan pengembangan Sarana dan Prasarana layanan di triwulan I	Terlaksana	Upaya ini dilaksanakan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan layanan melalui penyediaan, pemanfaatan, serta peningkatan kualitas fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam proses pelayanan
4.	Rekapitulasi terkait permohonan layanan dari unit kerja ke deputian pada triwulan I	Terlaksana	Telah terlaksana rekapitulasi terkait permohonan layanan dari unit kerja ke deputian pada triwulan I
5.	Tindak lanjut keluhan layanan dari unit kerja pada triwulan I	Terlaksana	Telah terlaksana tindak lanjut keluhan layanan dari unit kerja pada triwulan I

Selain pelaksanaan rencana aksi diatas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Identifikasi permasalahan dan meningkatkan kompetensi pegawai
- Analisis hasil survey dan identifikasi area perbaikan
- Penyusunan rencana tindak lanjut penyempurnaan layanan tahun 2026
- Peningkatan pemahaman pegawai terkait standar dan budaya pelayanan
- Pemeliharaan dan optimalisasi fasilitas pendukung layanan
- Zoom Meeting mampu mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja di lingkungan Kementerian
- Perhatian pimpinan dan pejabat di lingkungan Kementerian koordinator Bidang Perekonomian yang mendorong terwujudnya layanan
- Ketanggapan dalam pelayanan dan kesesuaian informasi yang diberikan oleh setiap pegawai Sekretariat mampu mendorong peningkatan kepuasan layanan yang diberikan
- Kecepatan dalam memberikan layanan yang dibutuhkan
- Kepastian layanan dalam menyelesaikan kendala/laporan yang diterima oleh unit kerja

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya berupa penghematan anggaran melalui optimalisasi ruang rapat sebagai sarana pendukung agenda RB.

- Penggunaan aplikasi via zoom untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam forum rapat sehingga memberikan ruang kepada seluruh peserta rapat untuk dapat mengikuti acara yang telah direncanakan.
- Penggunaan aplikasi penyimpanan berbasis Cloud, seperti Gdrive
- Penggunaan aplikasi dalam pelaporan dan pengukuran laporan kinerja
- Penggunaan aplikasi dalam menyampaikan kendala/laporan
- Evaluasi berkala yang dilakukan kepada para penyedia layanan kelompok substansi untuk meningkatkan layanan
- Koordinasi antar layanan untuk meningkatkan keahaman dan keselarasan dalam menyelesaikan laporan

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Ekspektasi tinggi penerima layanan dengan layanan yang diberikan oleh Sekretariat
- Terkendalanya aplikasi layanan karena gangguan jaringan
- Tingkat efektifitas pelaksanaan sosialisasi atau pendampingan kinerja yang diberikan kepada unit kerja
- Kepatuhan penerima layanan pada batas tenggang waktu pengumpulan dokumen
- Hasil kepuasan layanan Sekretariat tiap tahun selalu bernilai diatas 3,01 atau berpredikat Sangat Memuaskan, terkadang hal ini menjadi luput dari perhatian untuk dapat ditingkatkan dan dipertahankan

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan ini agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Semakin meningkatkan layanan yang akan diberikan kepada unit kerja sebagai penerima layanan, penguatan pada 5 (lima) aspek peningkatan kualitas layanan

- Pemeliharaan berkala pada aplikasi layanan, dan pemantauan laporan gangguan jaringan
- Menyampaikan materi sosialisasi yang dapat dipahami penerima layanan dan memastikan setiap unit kerja memahami substansi yang diberikan
- Melaksanakan *Follow Up* kepada para PIC unit kerja
- Menjaga koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan terkait hasil nilai dan evaluasi kepuasan layanan, agar dapat terus menjadi perhatian dari pimpinan

6

Sasaran Program 6 : Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

Pencapaian Sasaran Program 6 : Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenko Perekonomian

2.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenko Perekonomian

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Eselon I ini merupakan agregat dari nilai persentase pelaksanaan RB di level Eselon II, didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Biro Hukum dan Organisasi, dan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, dan Unit Inspektorat.

Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I tahun 2026, nilai persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenko Perekonomian yang telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 100% dari target triwulan I 2026 dengan ringkasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	%Kinerja
IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	%	25%**	25%**	100%**

***nilai bersifat penilaian mandiri, penilaian akhir dihasilkan diakhir tahun*

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan I 2026, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
No	Rencana Aksi Triwulan I	Status	Keterangan (Dapat Berisikan Kendala & Rekomendasi Perbaikan)
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2026	Terlaksana	Pada tanggal, 6 Januari 2026, Sekretariat melalui Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama telah melaksanakan koordinasi dan coaching clinic dengan seluruh unit kerja Eselon I dan II tentang penyusunan Perjanjian Kinerja 2026 dan pembahasan SOTK Kementerian Perekonomian melalui UND. No. AK.01.01/3/SES.M.EKON/01/2026
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	Tertunda/ Digeser	Koordinasi permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan I seluruh entitas eselon I dan II didasarkan pada amanat Perpres No. 29 tahun 2014 yang mana Eselon I dan II memiliki kewajiban memonitoring capaian indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja secara periodik pada triwulan I tertunda, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian target di tahun 2026 Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama sebagai koordinator dalam permintaan penyusunan telah menyusun draft laporan kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama pada triwulan I serta mengkoordinasi permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan unit kerja entitas eselon I dan II. Laporan Kinerja yang telah disusun akan ditetapkan oleh pimpinan dan diupload ke dalam Aplikasi kinerja Ekon GO. https://kinerja.ekon.go.id

3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI pada triwulan I	Terlaksana	• Sosialisasi Fitur Baru Mobile SRIKANDI Ke Admin, TU, dan User pada tanggal 9 Februari 2026 • pelaksanaan kegiatan identifikasi arsip terbuka untuk publik sebelum diunggah ke aplikasi SIKN • Pelaksanaan monitoring keaktifan user aplikasi SRIKANDI setiap triwulan
----	---	------------	---

Upaya - upaya nyata dan kegiatan yang menunjang capaian target serta efisiensi penggunaan sumber daya :

- Penetapan dokumen perencanaan Renstra, DPA, Rencana Kerja tahun 2026 pada level Menteri serta Entitas Eselon I dan II
- Menyusun dan menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berbasis kinerja, berdasarkan Cascading Kinerja yang telah ditetapkan
- Menetapkan draft laporan kinerja triwulanan untuk seluruh entitas unit kerja level Eselon I dan II
- Menyusun draft Nota Dinas permintaan penyusunan laporan kinerja triwulan I dan II pada entitas eselon I dan II
- Mengirim Nota Dinas Permohonan Reviu LAKIP Kementerian 2025 kepada Inspektorat Kemenko Perkonomian
- Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Deputy untuk dapat mereviu LAKIP 2025 Kedeputan (Eselon I tahun 2025)
- Melaksanakan breakfast meeting evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dan target 2026 yang dihadiri oleh pimpinan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I 2026 mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa implementasi efisiensi anggaran dan efisiensi SDM diantaranya :

- Pelaksanaan kegiatan Coaching Clinic dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola kinerja di unit kerja dalam mengelola kinerja dilaksanakan melalui zoom meeting dan ruang rapat kantor;
- Pengumpulan dan sharing data pengelolaan kinerja melalui media berbagi pakai (Google Drive, One Drive, dst);
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengelola kinerja EKON GO;
- Penetapan timeline tindaklanjut dokumen yang harus dihasilkan/disusun oleh entitas unit kerja pada akhir pelaksanaan rapat, hal ini bertujuan agar satu tema substantif dapat diselesaikan dalam satu rapat dan potensi pelaksanaan rapat berulang dengan tema yang sama dapat ditekan.

Hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang akan dilakukan pada rencana aksi triwulan selanjutnya. Nilai anggaran yang dapat di efisiensikan sepanjang triwulan I yaitu Rp. 134.435,000,- yang akan digeser untuk kegiatan selanjutnya dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kementerian.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut :

- Perpres terkait RKP yang baru diterbitkan setelah batas waktu penetapan Perjanjian Kinerja, hal ini mengakibatkan Unit Kerja perlu mereviu target kinerja yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja.
- Aplikasi mobile SRIKANDI hanya dapat digunakan untuk penerimaan naskah masuk dan pendisposisian surat, dan belum dapat digunakan untuk registrasi naskah keluar.
- Belum semua pegawai di Kemenko Perekonomian rutin dan aktif menggunakan aplikasi SRIKANDI.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai :

- Memantau relevansi target kinerja yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan target pada Dokumen RKP 2026. Apabila ditemukan ketidaksinkronan, maka akan dilakukan pemutakhiran target pada triwulan III.
- Memonitoring pelaporan pelaksanaan rencana aksi unit kerja dan memberikan feedback kualitas rencana aksi melalui Reviu Laporan Kinerja Triwulanan.
- Melakukan koordinasi yang intens dengan Tim SRIKANDI Pusat (Arsip Nasional RI).
- Mengirimkan Nota Dinas laporan penggunaan user aplikasi SRIKANDI pada setiap pimpinan unit kerja untuk terus menghimbau pegawai di unit kerjanya menggunakan aplikasi SRIKANDI.

Jakarta, 22 Juli 2026
Sekretaris Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian



Susiwijono 